

Economic Insight: Journal of Economic and Management

Journal homepage: <https://journal.aspublisher.co.id/index.php/economicinsight/index>

E-ISSN:xxxx-xxxx



MEMBANGUN EKONOMI CERDAS: PERAN DIGITALISASI KEUANGAN DALAM MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN INKLUSIF DI INDONESIA

Reni Ria Armayani Hasibuan^{1*}, Erwin Fitra Jauhari², Fitriani Lestari³, M. Fayyadh Akbar⁴, Nur Anisah Harahap⁵

^{1,2,3}Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ARTICLE INFO

Paper Type: Research Paper or Conceptual Paper

Article History:

Received 15 December 2025

Revised 18 December 2025

Accepted 23 December 2025

Available online 24 December 2025

How to Cite:

Hasibuan, et al. (2025).

Membangun Ekonomi Cerdas:

Peran Digitalisasi Keuangan

Dalam Mempercepat

Pertumbuhan Inklusif Di

Indonesia

Economic Insight: Journal of

Economic and Management, 1(1),

62–70.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur perekonomian global, termasuk di Indonesia. Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah digitalisasi layanan keuangan yang berperan strategis dalam membangun ekonomi cerdas (smart economy) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi keuangan dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap berbagai penelitian, laporan resmi, dan publikasi akademik terkait topik ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat peran UMKM dalam aktivitas ekonomi produktif. Program nasional seperti QRIS dan BI-FAST terbukti mempercepat adopsi sistem pembayaran digital secara luas. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi keuangan digital, kesenjangan infrastruktur, dan isu keamanan siber masih menghambat optimalisasi manfaat digitalisasi. Dengan memperkuat literasi digital, pemerataan infrastruktur, serta regulasi yang adaptif, digitalisasi keuangan berpotensi menjadi instrumen kunci dalam membangun ekonomi Indonesia yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Keywords: digitalisasi keuangan; ekonomi cerdas; fintech; inklusi keuangan; pertumbuhan inklusif.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital di tingkat global telah memicu perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi modern. Kehadiran layanan digital, platform daring, serta sistem pembayaran tanpa uang tunai semakin mempercepat proses intermediasi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha maupun rumah tangga yang sebelumnya berada di luar jangkauan layanan formal. Perubahan ini melandasi lahirnya konsep ekonomi cerdas (smart economy), yakni suatu sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong inovasi, efisiensi, serta pertumbuhan yang inklusif.

Di antara berbagai bentuk transformasi digital, digitalisasi sektor keuangan menjadi komponen

yang sangat penting. Layanan seperti mobile banking, e-wallet, pembiayaan digital, dan pembayaran elektronik tidak hanya memudahkan aktivitas transaksi, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan bagi kelompok yang kurang tersentuh oleh lembaga keuangan konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa keuangan digital berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia (Widarwati et al., 2022), sedangkan studi lainnya mengungkapkan bahwa inovasi kredit dan teknologi mampu menjembatani kesenjangan akses finansial di negara berkembang termasuk Indonesia (Adam et al., 2025).

Dalam konteks nasional, pemanfaatan layanan keuangan digital serta perkembangan ekosistem fintech tumbuh sangat cepat, terutama setelah pandemi COVID-19. Pertumbuhan ini membawa potensi besar untuk memperkuat inklusi keuangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Namun, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penggunaan yang produktif seperti pembiayaan usaha mikro atau peningkatan kapasitas UMKM serta belum menjamin kualitas layanan yang seimbang antarwilayah. Tantangan berupa infrastruktur digital yang timpang, rendahnya literasi keuangan digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif masih menjadi hambatan utama (Yasrizal & Mahrizal, 2025).

Literatur terkini menegaskan bahwa digitalisasi keuangan dapat menjadi pendorong pertumbuhan inklusif pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga merata antar kelompok masyarakat. Dengan memperluas akses pembiayaan, menurunkan biaya transaksi, serta menyederhanakan sistem pembayaran, digitalisasi keuangan berpotensi menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Meski demikian, dampaknya sangat dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem pendukung, seperti literasi digital, perlindungan konsumen, dan regulasi yang adaptif (Tay et al., 2022).

Walaupun potensinya besar, riset empiris yang secara langsung menautkan digitalisasi layanan keuangan dengan pertumbuhan inklusif di Indonesia masih terbatas, terutama yang menguji hubungan antara indikator inklusi keuangan digital (akses, penggunaan, dan kualitas) dengan capaian pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan. Kajian terbaru bahkan menunjukkan bahwa peningkatan inklusi belum sepenuhnya memberi dampak optimal terhadap pemerataan dan pertumbuhan yang inklusif (Yaqin & Safuan, 2023).

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan kontribusi digitalisasi keuangan dalam membangun ekonomi cerdas di Indonesia melalui jalur inklusi keuangan, termasuk tantangan, faktor pendukung, dan kebijakan yang relevan. Secara ringkas, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan analisis empiris serta tinjauan

kebijakan mengenai bagaimana digitalisasi keuangan mendorong pertumbuhan inklusif, di mana konsep smart economy digunakan sebagai kerangka besar untuk memahami peran teknologi digital sebagai katalis pembangunan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan

METHOD

Artikel ini menggunakan metode literature review untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terkait Peran Digitalisasi Keuangan dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Inklusif Indonesia. Sumber literatur yang digunakan mencakup buku, jurnal akademik, laporan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang tren, temuan, dan kesenjangan dalam topik ini.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Tren dan Perkembangan Digitalisasi Keuangan di Indonesia

Digitalisasi keuangan di Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi finansial dan semakin luasnya jangkauan infrastruktur digital. Laporan Bank Indonesia (2023) dalam Kebijakan Moneter Triwulan IV menunjukkan bahwa nilai transaksi perbankan digital menembus Rp 58.478,24 triliun, atau naik 13,48% secara tahunan. Sementara itu, transaksi uang elektronik melonjak 43,45% yoy menjadi Rp 835,84 triliun. Kenaikan tersebut menggambarkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan layanan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun pembiayaan usaha kecil.

Data bulanan dari (Liputan6, 2023) juga mengonfirmasi tren serupa. Pada Oktober 2023, transaksi digital banking mencapai Rp 5.118,9 triliun (tumbuh 15,57% yoy), sedangkan transaksi e-money mencapai Rp 41,71 triliun atau naik 17,67% yoy. Angka-angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pembayaran digital berkat kemudahan akses, efisiensi biaya, serta meningkatnya literasi digital.

Selain sektor perbankan, industri financial technology (fintech) menunjukkan perkembangan yang sama pesatnya. Berdasarkan data OJK tahun 2024 (OJK, 2024), total pembiayaan outstanding fintech P2P lending mencapai Rp 59,64 triliun atau meningkat 16,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini menandai peran penting fintech dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan, terutama bagi UMKM yang selama ini sulit terakses lembaga keuangan formal.

Keberadaan fintech turut memperkuat upaya inklusi keuangan nasional dengan

menghadirkan opsi pembiayaan yang lebih cepat dan mudah. Pertumbuhan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi ekonomi. Program seperti BI-FAST, QRIS, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menjadi pendorong penting efisiensi transaksi dan perluasan akses layanan keuangan. Data Bali Express (2023) yang mengutip laporan BI mencatat jumlah merchant QRIS hingga Oktober 2023 mencapai 29,63 juta, sebagian besar merupakan UMKM. Capaian ini menegaskan keberhasilan pemerintah dalam mendorong digitalisasi pembayaran hingga sektor ekonomi rakyat, sekaligus mempercepat terbentuknya sistem keuangan yang transparan, efisien, dan inklusif.

Secara keseluruhan, digitalisasi keuangan kini menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi cerdas (smart economy) di Indonesia. Pertumbuhan transaksi digital, ekspansi layanan fintech, serta dukungan regulasi yang konsisten menunjukkan bahwa Indonesia bergerak menuju struktur ekonomi berbasis teknologi dan inklusi. Tantangan berikutnya adalah memperkuat literasi keuangan digital dan meningkatkan keamanan siber agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan merata tanpa memperlebar kesenjangan digital.

2. Dampak Digitalisasi Keuangan terhadap Inklusif Keuangan

Digitalisasi keuangan memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian oleh Widarwati et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan berbasis digital mulai dari mobile banking, e-money, hingga platform pembayaran digital secara signifikan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal. Semakin luas penggunaan teknologi tersebut, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan, terutama bagi kelompok yang selama ini sulit dijangkau oleh bank konvensional. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi keuangan menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi kesenjangan akses keuangan.

Dari sisi praktik, layanan digital mempermudah masyarakat melakukan berbagai aktivitas keuangan tanpa harus hadir secara fisik di kantor bank. Studi Sriyono et al. (2023) mencatat bahwa layanan pembayaran digital yang disediakan oleh fintech mampu meningkatkan tingkat inklusi keuangan hingga 12–15% di sejumlah wilayah perkotaan dan pinggiran. Kenaikan ini terlihat dari peningkatan jumlah akun digital, meningkatnya transaksi harian, serta bertambahnya akses kredit produktif untuk UMKM.

Selain memperkuat akses, digitalisasi keuangan juga meningkatkan efisiensi layanan. Teknologi pembayaran digital dan dompet elektronik menurunkan biaya transaksi,

mempercepat proses, dan menghilangkan hambatan geografis. Integrasi antara teknologi digital dan sistem perbankan juga mendorong peningkatan literasi keuangan karena pengguna mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai produk dan risiko keuangan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga kualitas pemanfaatannya. Namun, efektivitasnya tetap ditentukan oleh ketersediaan literasi digital yang memadai, perlindungan data pengguna, serta kebijakan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

3. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Peran digitalisasi keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia sangatlah strategis. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal membuat hambatan transaksi berkurang, perputaran modal lebih cepat, dan keterlibatan ekonomi masyarakat meningkat. Perluasan ini turut memperbesar kapasitas sektor ekonomi produktif, khususnya bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan memperoleh kredit dari lembaga konvensional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan indikator inklusi keuangan digital berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Semakin besar adopsi layanan keuangan digital, semakin kuat pula potensi tercapainya pertumbuhan yang bersifat merata dan berkelanjutan, karena masyarakat di wilayah marginal turut menikmati akses pembiayaan dan peluang investasi. Walaupun demikian, manfaat digitalisasi terhadap pertumbuhan inklusif sangat dipengaruhi oleh kesiapan literasi keuangan masyarakat, pemerataan infrastruktur digital, serta keberadaan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Jika elemen-elemen tersebut dipenuhi, digitalisasi keuangan dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Faktor Pendukung dan Hambatan Digitalisasi Keuangan

Digitalisasi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan hambatan. Berikut penjelasannya secara terstruktur:

a. Faktor Pendukung

1) Infrastruktur digital yang meningkat.

Penetrasi internet yang luas dan penggunaan smartphone yang tinggi memudahkan masyarakat mengakses layanan digital. Integrasi sistem pembayaran nasional, seperti QRIS dan BI-FAST, mempermudah transaksi lintas platform secara real-time, menurunkan biaya dan waktu transaksi.

2) Adopsi masyarakat dan UMKM

Masyarakat dan pelaku UMKM semakin terbiasa menggunakan layanan fintech untuk pembayaran dan pembiayaan. Kemudahan penggunaan aplikasi, biaya transaksi rendah, dan edukasi literasi keuangan digital mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas.

3) Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah

Regulasi adaptif meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital. Program seperti Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) memperluas inklusi hingga ke daerah terpencil.

b. Faktor Penghambat

1) Literasi keuangan dan digital yang belum merata

Masih banyak masyarakat, terutama di wilayah terpencil, yang kurang memahami produk keuangan digital, sehingga menimbulkan risiko salah penggunaan atau ketidakpercayaan.

2) Kesenjangan infrastruktur.

Akses internet dan perangkat digital masih terbatas di beberapa daerah, menghambat penetrasi layanan fintech dan pembayaran digital.

3) Persepsi risiko dan sosial

Kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital dan kurangnya pemahaman mekanisme pembayaran dapat memperlambat adopsi.

Menurut Rachman et al. (2024), keberhasilan penerapan layanan keuangan digital, termasuk QRIS, sangat ditentukan oleh tingkat literasi digital masyarakat, kesiapan infrastruktur pendukung, dan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa adanya tiga faktor ini, proses digitalisasi keuangan akan meningkat secara lambat dan manfaatnya bagi inklusi keuangan maupun pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi kurang maksimal.

Dengan memperkuat faktor penunjang serta mengatasi hambatan yang ada, digitalisasi keuangan dapat memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Langkah yang dianjurkan meliputi penyelenggaraan program literasi digital, peningkatan keamanan siber, dan pemerataan infrastruktur agar seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan digital secara efektif.

CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi keuangan berperan signifikan dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Dengan meningkatnya akses dan penggunaan layanan digital seperti digital banking, e-money, fintech lending, dan QRIS, masyarakat termasuk UMKM memperoleh peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi tiga aspek, yaitu digitalisasi keuangan, inklusi keuangan, dan pertumbuhan inklusif ke dalam satu kerangka analitis yang menunjukkan bahwa dampak digitalisasi hanya optimal bila ditopang oleh literasi digital, infrastruktur yang merata, dan regulasi yang adaptif. Penelitian ini memperluas pemahaman yang ada dengan memberikan justifikasi bahwa efisiensi transaksi saja tidak cukup. Ekosistem pendukung menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital keuangan.

Implikasinya, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pemerataan infrastruktur, edukasi literasi digital, serta keamanan siber agar manfaat digitalisasi dapat diakses secara merata. Untuk penelitian mendatang, studi kuantitatif yang menguji hubungan kausal antara indeks inklusi keuangan digital dan indikator pembangunan daerah, serta eksperimen kebijakan seperti perluasan QRIS atau model pembiayaan digital UMKM, direkomendasikan untuk memperdalam bukti empiris mengenai dampak digitalisasi keuangan.

REFERENCES

- Adam, L., Sarana, J., Suyatno, B., Soekarni, M., Suryanto, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Adityawati, S., Mychelisda, E., Pamungkas, Y., Abdillah, M. R. N., Angelia, L., & Thoha, M. (2025). Driving Financial Inclusion in Indonesia with Innovative Credit Scoring. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 442. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080442>
- Bali Express. (2023, Desember). Bank Indonesia Catat Jumlah Merchant QRIS Capai 29,63 Juta pada 2023, Didominasi Kalangan UMKM. *Bali Express*. <https://baliexpress.jawapos.com/bisnis/673454696/bank-indonesia-catat-jumlah-merchant-qr-2963-juta-pada-2023-didominasi-kalangan-umkm>
- Bank Indonesia. (2023, January 22). Monetary Policy Report—Quarter IV 2023. Bank Indonesia - Economic and Monetary Policy Department. https://www.bi.go.id/en/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2023.aspx?utm_source
- Liputan6. (2023, November 23). Transaksi Digital Banking Indonesia Sentuh Rp 5.118 Triliun di November 2023. *Liputan6*. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5462781/transaksi-digital-banking-indonesia-sentuh-rp-5118-triliun-di-november-2023?utm_source
- OJK. (2024, January 30). OJK: Outstanding pembiayaan pinjol capai Rp59,64 triliun pada 2023. *Antara Kantor Berita Indonesia*. https://www.antaranews.com/berita/3939957/ojk-outstanding-pembiayaan-pinjol-capai-rp5964-triliun-pada-2023?utm_source
- Rachman, A., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). Challenges and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2024.8.1.2134>
- Sriyono, S., Andjani, S., & Irawan, M. F. (2023). Evaluation of Fintech's Impact on Financial Inclusion in Indonesia: A Case Research on the Use of Digital Payment Services. *The Management Journal of Binaniaga*, 8(2), 91–102. <https://doi.org/10.33062/mjb.v8i2.32>
- Tay, L.-Y., Tai, H.-T., & Tan, G.-S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. *Heliyon*, 8(6), e09766. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09766>

- Widarwati, E., Solihin, A., & Nurmalasari, N. (2022a). Digital Finance For Improving Financial Inclusion Indonesians' Banking. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(1), 17–30. <https://doi.org/10.15408/sjie.v11i1.17884>
- Widarwati, E., Solihin, A., & Nurmalasari, N. (2022b). Digital Finance For Improving Financial Inclusion Indonesians' Banking. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(1), 17–30. <https://doi.org/10.15408/sjie.v11i1.17884>
- Yaqin, M., & Safuan, S. (2023). Digital Financial Inclusion and Implications for Developing Countries Economic Growth. *Journal of Developing Economies*, 8(1), 29–48. <https://doi.org/10.20473/jde.v8i1.38361>
- Yasrizal, S. M., & Mahrizal, S. A. (2025). An Integrative Model of Digital Financial Inclusion in Indonesia. 6.

- Fikri, A. R., & Syarif, A. (2023). Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Digital. *Jurnal Ekonomi Islam Madani*, 5(1), 21–39.
- Ghofur, A. (2019). Peran Negara dalam Keseimbangan Pasar Syariah. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(1), 44–56.
- Hosen, M. N. (2020). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(3), 208–221.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2020). Islamic Moral Economy in the 21st Century. *International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 71–88.
- International Monetary Fund (IMF). (2020). Islamic Finance and Financial Stability. IMF Working Paper.
- Karim, A. A. (2023). Reformasi Sistem Keuangan Syariah dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 13–29.
- Kurniawan, M. I., & Latifah, S. (2021). Hisbah dalam Perspektif Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Al-Muamalat*, 6(2), 110–124.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Pedoman Bisnis Syariah dan Pasar Islami*. Jakarta: MUI Press.
- Mubarak, H., & Fatimah, N. (2022). Evaluasi Praktik Ihtikar dan Gharar di Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam Tazkia*, 9(2), 155–170.
- Nawawi, M. Z., & Sari, D. P. (2020). Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 5(1), 90–104.
- Nur, A. (2023). Digitalisasi Pasar dan Tantangannya dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 77–92.
- OJK. (2022). *Laporan Kinerja Keuangan Syariah Nasional*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rini, D., & Zein, A. W. (2023). Praktik Bisnis Islami di Indonesia: Antara Teori dan Realita. *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 6(2), 141–159.
- Sari, R. N., & Maulana, F. M. (2021). Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Analisis Teoretis. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7(3), 200–214.
- Suwandi, A., & Jannah, S. (2022). Islamic Ethical Values and Market Balance: Empirical Study in Southeast Asia. *Global Islamic Economic Review*, 5(4), 123–139.
- Yusuf, M., & Prasetyo, D. A. (2023). Peran Hisbah dan Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjaga Integritas Pasar. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 37–54.
- Zein, Ahmad Wahyudi, et al. (2023). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Medan: UINSU Press.